

At Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam
IAIN Kudus

ISSN : 2338-8544

E-ISSN : 2477-2046

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/at-tabsyir.v7i1.7581>

Vol. 7 No. 1, 2020

<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/komunikasi>

Komunikasi dan Demokrasi, Pilar Utama Membangun Moderasi Islam

M. Yakub Amin

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

m.yakub@uinjkt.ac.id

Abstrak

Komunikasi adalah suatu hal yang menjadi kebutuhan manusia. Apalagi komunikasi yang menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Komunikasi yang mengajak penggunanya untuk selalu berkomunikasi sesuai dengan ajaran Islam disebut komunikasi Islam. Demokrasi adalah sebuah sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan, keadilan, serta persatuan, dibutuhkan komunikasi yang baik serta yang menuntun kearah kebaikan agar terciptanya demokrasi yang sesuai pada prinsipnya. Moderasi Islam adalah sikap-sikap yang mampu menjadi penengah dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang menjalankan konsep moderasi Islam disebut Islam moderat. Ketiga konsep ini akan berjalan jika menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang terwujud dalam Islam *rahmatan lil alamin*. Dengan berbagai dinamika demokrasi, maka moderasi Islam mampu menjadi solusi dengan menjalankan Islam yang *rahmatan lil alamin*. Tidak heranlah konsep Islam sangat membantu dalam menerapkan sistem demokrasi walaupun demokrasi sejatinya bukan terlahir dari rahim ajaran Islam.

Kata kunci: komunikasi, demokrasi, moderasi Islam

Pendahuluan

Islam adalah sebuah tatanan kehidupan yang paling sempurna, maka agama inilah satu-satunya yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Baik bangun tidur hingga tidur lagi. Konsep Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. tercermin dalam setiap perbuatan dan kebijakan beliau. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang paling paripurna dalam menghidupkan nafas duniawi serta ukhrawi. Dalam tatanan duniawi, Rasulullah mengajarkan berbagai hal, baik sosial, politik, budaya maupun ekonomi. Semuanya telah tergambar sangat jelas dalam dua hukum yang telah beliau tinggalkan yaitu Alquran dan hadis.

Pada tatanan modern saat ini tentunya banyak perubahan-perubahan nilai yang terjadi yang tentunya asing di zaman Nabi. Pada saat ini berkembang berbagai konsep secara keilmuan yang tidak pernah dibahasakan pada era Nabi Muhammad saw, seperti dakwah dalam tataran saat ini tentunya bisa disebut dengan Komunikasi Islam. Komunikasi Islam dapat dipahami ialah penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator (dai) kepada komunikan (*mad'u*) yang berlandaskan Alquran dan hadis. Konsep komunikasi pada era Nabi Muhammad tentunya tidak lah terlepas pada tataran yang sempit, dikarenakan belum berkembangnya ilmu pada saat itu. Rasul sebagai seorang pemimpin sekaligus pendakwah, tokoh spiritual, mengajarkan kepada pengikutnya agar dalam segala aspek mengutamakan akhlak dan moral. Karena seperti Firman Allah, pada QS. Al-Ahzab 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.

Ayat tersebut menekankan konsep diri Nabi Muhammad saw. yang langsung diakui oleh Allah Swt. dalam Alquran, yaitu kalimat suri tauladan atau akhlak yang paripurna yang tidak dimiliki oleh manusia manapun baik sebelumnya ataupun setelahnya. Konsep diri Nabi Muhammad tentunya menggambarkan bagaimana beliau bersikap baik sebagai pemimpin ataupun sebagai sosok tokoh sentral spiritual kala itu. Beliau menjadi satu-satunya panutan dalam setiap hal, baik sosial, politik budaya, ekonomi dan sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis Aisyah mengatakan akhlak Rasul adalah Alquran.

Pada kehidupan era modern saat ini, manusia mengagungkan sistem-sistem yang sebenarnya telah diajarkan Rasul, seperti sistem demokrasi. Pada azas demokrasi, tidak melihat siapa yang memiliki jabatan tertinggi ataupun siapa yang memiliki kedudukan tertinggi, pada musyawarah mana pendapat yang mampu menuntun pada jalan kebaikan baik secara individu atau kelompok manusia (kemaslahatan umat) maka pendapatnya akan diambil dan dijadikan sebuah kebijakan. Pada tataran memilih pemimpin setiap orang memiliki hak yang sama, serta tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Teringat pada kisah Perang Khandaq, ketika saat itu Rasulullah merumuskan sebuah strategi perang, lalu seorang sahabat Nabi Salman Al-Farisi bertanya apakah keputusan Rasul diambil atas wahyu atau inisiatif Rasul, maka Rasul menjawab atas inisiatifnya sendiri. Lalu, Salman Al-Farisi meminta izin untuk memberikan masukan mengenai strategi perang, lalu Rasul menerima masukannya dan tercatat dalam sejarah strategi perang Salman Al-Farisi ampuh dalam peperangan tersebut. Konsep demokrasi telah diajarkan oleh Rasulullah bahkan sebelum orang-orang modern mendengung-dengungkannya. Rasulullah sebagai otoritas utama, pemimpin utama, sang Nabi yang diutus Tuhan bisa saja menolak pendapat Salman Al-Farisi dengan legitimasi kenabiannya. Tapi dengan akhlak beliau, serta pemikiran beliau yang jauh melampaui manusia (futuristik) pada saat itu menerima pendapat Salman, dan langsung mengeksekusi apa yang disarankan oleh sahabatnya itu.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Dimana rakyat diikutsertakan dalam demokrasi tersebut dan rakyat juga sebagai pemegang kekuasaan serta mengontrol jalannya suatu pemerintahan. Banyak dari para cendekia di masa lampau yang mencoba untuk menjabarkan apa dan bagaimana arti dari demokrasi dalam suatu penyelenggaraan negara. Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari *polis* yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara (Irawan, 2006:55).

Demokrasi sebagai kekuatan ataupun pilar utama dalam setiap pergerakan nasional menjadi suatu yang sangat penting. Dalam konsep-konsep modern perlunya moderasi Islam mengambil peran dalam komunikasi dan demokrasi. Komunikasi

sebagai suatu yang fundamental dalam masyarakat menjadi sangat penting, apalagi dengan konsep komunikasi Islam. Komunikasi Islam harus mampu menjadi alat moderasi yang kuat demi terjalankannya demokrasi yang sesuai dengan syariat Islam. Islam yang berlandaskan Alquran dan hadis tidak boleh tergerus oleh zaman dalam mencapai keadilan dan kebaikan keummatan. Alquran sebagai kitab suci umat Islam menjadi panduan yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam hal ini Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persatuan, dan musyawarah. Maka dengan konsep moderasi seharusnya demokrasi dapat dijalankan dengan semangat keislaman.

Mengenai keadilan menurut Ashgar Ali Engineer dalam bukunya *Islam dan Teologi Pembebasan*, dia mengatakan bahwa Allah menyuruh berbuat adil dan kebaikan. Juga disebutkan bahwa orang-orang yang beriman dilarang berbuat tidak adil meskipun kepada musuhnya, dan agar tetap memegang keadilan, serta lebih dari itu Alquran menyatakan bahwa keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Alquran menempatkan keadilan sebagai bagian integral dari taqwa. Dengan kata lain, taqwa di dalam Islam bukan hanya sebuah konsep ritualistik, namun juga secara integral terkait dengan keadilan sosial dan ekonomi (Engineer, 2009:58).

Apa yang dijelaskan oleh Ashgar Ali Engineer mengenai keadilan sangat penting untuk dikaji. Ternyata dalam perjalanan hidup umat Islam dia harus mampu memunculkan sikap-sikap adil dalam setiap aspek. Karena Islam bukan hanya agama yang menekankan nilai-nilai ritualistik untuk mampu mencapai keridhaan Allah Swt., tapi lebih dari itu. Demokrasi haruslah menjunjung nilai-nilai keadilan, sebagai negara yang memiliki umat Islam terbesar, Indonesia haruslah mampu menjadi *rule model* untuk menjadi “tauladan” bagi negara lain dalam melakukan nilai-nilai demokrasi yang dibalut moderasi Islam.

Maka, konsep moderasi haruslah menyentuh hal yang paling dasar dalam setiap individu, yaitu nilai taqwa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Ashgar Ali Engineer, hanya taqwalah yang dipandang dalam diri seorang Muslim, maka konteks demokrasi haruslah menjadi kekuatan bagi umat Islam untuk menjalankan aturan-Nya.

Tentunya saat ini sistem demokrasi yang terjadi di setiap negara mayoritas Islam belum mampu mengkombinasikan nilai-nilai moderasi Islam dalam berdemokrasi. Demokrasi hanya menjadi alat sebagian orang untuk menguntungkan pribadi maupun golongannya. Tentunya ini sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Komunikasi yang

tidak transparan antara masyarakat bawah ataupun golongan bawah dengan orang-orang golongan atas menjadi masalah tersendiri. Demokrasi yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman maka lebih dekat dengan sikap nasionalis yang liberalis serta kapitalis. Padahal Islam juga memerintahkan umatnya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalis, seperti ayat-ayat yang menjelaskan perangilah kezhaliman, serta tegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Ini tentunya perlu menjadi koreksi utama bagi individu umat Islam yang kehilangan jati diri keislaman dalam menerapkan demokrasi, sehingga moderasi Islam tidak mampu terealisasi dalam setiap sendi kehidupan umat Islam saat ini.

Pembahasan

Komunikasi Islam dalam Pusaran Demokrasi

Komunikasi adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tidak ada manusia di muka bumi yang bisa hidup tanpa berkomunikasi. Dalam konteks kekinian eksistensi sangat dibutuhkan, apalagi dengan berkembang era globalisasi serta istilah *global village* yang memiliki arti bahwa orang-orang dapat berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh dengan kemajuan teknologi seperti yang tersemat pada dunia saat ini, dikarenakan mudahnya orang berkomunikasi antar jarak. Hal yang menjadi kajian penting pada saat ini, bagaimana peran Komunikasi Islam dalam pusaran demokrasi? Sebelum menjelaskan peran komunikasi Islam dalam demokrasi maka perlu diketahui dahulu peran komunikasi secara konvensional terhadap demokrasi saat ini.

Menurut Fiske, komunikasi menentukan arah demokrasi. Lebih lanjut dia mengatakan hal ini disebabkan bahwa komunikasi yang berjalan secara terbuka dapat mempercepat proses demokratisasi. Komunikasi dalam domain persoalan ini dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikator (*sender*) kepada komunikan (*receiver*). Persoalan yang dianggap sangat penting dari definisi komunikasi ini ialah bagaimana pengirim pesan mengemas serta mengirimkan pesan (*encode*) dan bagaimana pihak penerima pesan memahaminya (*decode*). Efisiensi (kehematan) dan akurasi (ketepatan) adalah tujuan yang hendak dicapai dalam mazhab (aliran pemikiran) ini (Fiske, 1990:101).

Konsep komunikasi seperti diatas tentunya secara kontekstual dapat dipahami bahwa komunikasi haruslah suatu hal yang mampu dipahami masing-masing orang yang berkomunikasi. Jadi, saling kesepahaman antara orang yang berkomunikasi sangatlah penting. Saling kesepahaman dalam sikap keadilan inilah yang harusnya dijunjung tinggi dalam berdemokrasi. Dalam konteks Islam dan demokrasi, Gellner “menemukan” bahwa Islam mempunyai kesamaan unsur-unsur dasar *family resemblances* dengan demokrasi. Demikian pula ketika Robert N. Bellah sampai pada kesimpulan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah bersifat egaliter dan partisipatif. Demikian terkesannya Bellah sehingga berani menilai bahwa apa yang dilakukan Nabi adalah terlalu modern untuk zamannya. Meskipun karena tipisnya sumber daya yang dimiliki, rekayasa demokratis (*democratic engineering*) gagal untuk dipertahankan. *It was too modern to succeed* (Bellah, 1991:151) Berbicara mengenai demokrasi maka tidak luput dari konteks kenegaraan. Demokrasi sebagai sistem haruslah mampu menjadi solusi bagi masyarakat seluruhnya. Dalam konteks keislaman, Islam memiliki empat prinsip dalam konteks kehidupan bernegara, adapun empat prinsip tersebut ialah: 1) mengakui kedaulatan Tuhan; 2) menerima otoritas Nabi Muhammad; 3) memiliki status wakil Tuhan; dan 4) menerapkan syariah. Sehubungan hal tersebut, maka dalam negara pemegang kedaulatan sesungguhnya berada pada Tuhan. Dalam kaitan ini Maududi menyebutkan bukan negara teokrasi, namun teo-demokrasi. Sistem ini tidak sama dengan sistem teokrasi yang pernah diterapkan oleh dunia Kristen. Dalam sistem teo-demokrasi, kaum Muslimin tetap memiliki kedaulatan meskipun terbatas di bawah pengawasan Tuhan (Maududi, 1998:160).

Demokrasi secara konvensional memiliki karakteristik utama lain selain kekuasaan di tangan rakyat. *Pertama*, kedudukan terhadap undang-undang. Artinya setiap anggota masyarakat menaatinya sebagai sebuah undang-undang yang sama rata. inilah nilai positif dari demokrasi dari segi prinsip. *Kedua*, demokrasi menjunjung tinggi dan menjamin hak asasi manusia dan kebebasannya. *Ketiga*, demokrasi memisah kekuasaan menjadi tiga seperti yang telah dijelaskan, sehingga tidak ada salah satu penguasa yang dominan (Thalhah, 2002:258). Menurut Mustafa Muhammad Thalhah, para pelaku demokrasi pun tidak bersikeras mempersoalkan bahwa kekuasaan di tangan syariat, namun mereka menentang habis-habisan jika kekuasaan dipegang oleh seorang penguasa yang tirani dan diktator. Konsep seperti ini pun juga sesuai dan sudah

dijelaskan dalam Al Qur'an. Itu artinya prinsip, yaitu *syura* yang menentang kediktatoran dapat masuk dalam sistem demokrasi yang sama-sama menentang kediktatoran. Standar yang diajarkan Allah terletak pada esensi dan prinsip. Keduanya berasal dari sumber yang tersucikan dari intervensi peradaban dan kebudayaan yaitu wahyu ilahi yang suci. Esensi dan prinsip politik yang tidak boleh berubah itu adalah nilai Islam, bukan sistem dan bentuknya (Thalhah, 2002:13).

Mengenai hubungan Islam dengan demokrasi, Nurcholish mengemukakan landasan etik dan konsep utama dari demokrasi sebagai berikut:

Pertama, landasan etik. Pada landasan ini Nurcholish mengemukakan: 1) Manusia memikul akuntabilitas atas sikap tindakannya di dunia, setelah ia hidup, dan sesudah mati. 2) Perlunya sikap jiwa yang mampu menahan diri. 3) Mengingat bahwa upaya memperjuangkan demokrasi dan hak asasi itu sering menghadapi kenyataan-kenyataan yang bertentangan, seperti yang dikemukakan Bung Hatta bahwa kebebasan yang tak terkendali akan mengundang lawan kebebasan itu sendiri, yaitu tirani.

Kedua, konsep demokrasi. Bagi Nurcholish, intisari demokrasi adalah proses dinamis ke arah perbaikan sehingga pendefinisian yang terlalu kaku dan bersifat final tidaklah tepat. Menurut Nurcholish, negara demokrasi adalah negara memiliki sistem terbuka sehingga promosi sosial, mobilitas vertikal tidak lagi berdasarkan hal-hal kenisbatan (*askriptif*), misalnya suku apa, bahasa daerah apa, keturunan siapa, itu tidak lagi relevan, tetapi yang dipentingkan adalah kemampuan dan profesionalitas yang dapat dibentuk oleh pendidikan (Madjid, 1994:34).

Menilik pendapat Nurcholis Madjid diatas mengenai demokrasi bahwa yang pertama adanya landasan etik, etik ataupun etika adalah suatu yang sangat dijunjung dalam Islam. Pada komunikasi Islam dituntut untuk selalu mengutamakan moral dan akhlak yang diajarkan oleh Alquran dan hadis, maka dalam berdemokrasi pun sangat dianjurkan menjunjung nilai-nilai tersebut. Pada pendapat Nurcholis di atas, bahwa dalam memperjuangkan demokrasi tidak selamanya mulus, pasti ada saja cobaan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan konteks demokrasi yang sebenarnya. Maka, kesabaran dalam berkomunikasi dan tetap menjunjung asas-asas keislaman. Sikap demokrasi yang diajarkan oleh Rasul tergambar dari setiap tindakannya. Walaupun beliau seorang pemimpin, tetapi dalam berkomunikasi beliau selalu menghormati dan menghargai pendapat dari para sahabatnya.

Pendapat kedua Nurcholis Madjid ialah konteks demokrasi yang harusnya menuju pada perbaikan masyarakat. Maka harusnya demokrasi yang dijunjung saat ini menjadi solusi bagi masyarakat untuk perbaikan baik sosial, budaya, politik maupun ekonomi. Dalam ranah komunikasi Islam “bahasa” demokrasi haruslah santun dan menunjukkan ide-ide yang menjauh *status quo* yang menindas rakyat, dalam hal ini tentunya konteksnya pada tatanan sistem demokrasi yang menggunakan bahasa-bahasa Islami untuk merumuskan suatu kebijakan yang pro-keadilan.

Menurut Fahmi Huwaidi (Huwaidi, 1996:193), demokrasi sangat dekat dengan Islam dan substansinya sejalan dengan Islam. Argumentasi yang dihadirkan oleh Fahmi Huwaidi adalah: *Pertama*, beberapa hadits menunjukkan bahwa Islam menghendaki pemerintahan yang disetujui oleh rakyatnya. *Kedua*, penolakan Islam kepada kediktatoran. *Ketiga*, dalam Islam, pemilu merupakan kesaksian rakyat dewasa bagi kelayakan seorang kandidat dan mereka tentu saja seperti yang diperintahkan Alquran. *Keempat*, demokrasi merupakan sebuah upaya mengembalikan sistem kekhilafahan *khulafaurrasyidin* yang memberikan hak kebebasan kepada rakyat yang hilang ketika beralihnya sistem kekuasaan Islam kepada sistem kerajaan. *Kelima*, negara Islam adalah negara keadilan dan persamaan ma-nusia di depan hukum. *Kelima*, suara mayoritas tidaklah identik dengan kesesatan, kekufuran dan ketidaksyukuran. *Keenam*, legislasi dalam parlemen tidaklah berarti penentangan terhadap legislasi ketuhanan.

Sedangkan menurut Muhammad Husein Haikal dalam bukunya yang berjudul “Pemerintahan Islam” (Haikal, 1993:95) bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip utama Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh paham demokrasi sekarang sebenarnya juga merupakan kaidah-kaidah Islam.

Penjelasan diatas mengkaji mengenai konteks Islam dan Demokrasi yang notabene tidak terlepas dari konsep komunikasi Islam. Tetapi ada hal yang paling mendasar yang harus diketahui mengenai konsep demokrasi dan komunikasi Islam, yaitu *Syura (Shura)*. Dua hal ini haruslah dipahami dalam kajian ini, agar mendapat titik tengah apakah demokrasi sesuai dengan komunikasi Islam.

Jika merujuk awal munculnya kriteria negara demokrasi pada hasil Kongres Amerika pada tahun 1989, bahwa kongres tersebut memutuskan beberapa kriteria sebuah negara bisa dikatakan demokratis bila; *Pertama*, didirikan sistem politik yang

sepenuhnya demokratis dan representatif berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan adil; *Kedua*, diakui secara efektif kebebasan-kebebasan fundamental dan kemerdekaan-kemerdekaan pribadi, termasuk kebebasan beragama, berbicara dan berkumpul; *Ketiga*, dihilangkan semua perundang-undangan dan peraturan yang menghalangi berfungsinya pers yang bebas dan terbentuknya partai-partai politik; *Keempat*, diciptakan suatu badan kehakiman yang bebas; dan *Kelima*, didirikan kekuatan-kekuatan militer, keamanan, dan kepolisian yang tidak memihak (Kamil, 2002:32).

Dari beberapa prinsip di atas, sepintas terlihat bahwa konsep demokrasi sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alquran tentang *syura*, tetapi apakah benar kedua istilah ini sama, baik itu dalam konsep maupun aplikasinya. Menanggapi permasalahan ini, kalangan intelektual Muslim saling berbeda pendapat. Mengutip klasifikasi yang dilakukan oleh John L. Esposito dan James P. Piscatori dalam Jurnal “*Islam and Democracy*” (Piscatori, 1991) tanggapan para cendekiawan Muslim terhadap demokrasi bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

Pertama, sebagian dari mereka memandang demokrasi dan *syura* adalah dua hal yang identik akan tetapi terdapat juga perbedaan. Di antara cendekiawan Muslim yang beranggapan seperti adalah Imam Khomeini. Ia mengatakan bahwa di satu sisi Iran menganggap bahwa Tuhan sebagai penguasa mutlak yang semua perintah-Nya harus diikuti, sedangkan di sisi lain sebagai negara republik, Iran memandang perlunya partisipasi rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, seperti lewat pemilu untuk memilih wakil mereka di parlemen, pemilu presiden. Pemerintah Iran merupakan pemerintahan hukum Tuhan atas manusia sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga dengan parlemen yang bertugas menyusun program untuk berbagai kementerian, dengan kekuasaan tertinggi di tangan seorang faqih (Sihbudi, 1993:174).

Kedua, sebagian yang lain memandang berbeda yakni *syura* dan demokrasi adalah dua hal yang saling berlawanan dan harus ditolak. Di antara cendekiawan Muslim yang masuk dalam katagori ini adalah Syaikh Fadhallah Nuri, Sayyid Qutub, al-Sya’rawi, Ali Benhadji, Hasan Turabi, Abu al-A’la al-Maududi.

Ketiga, sebagian lagi dengan maksud mendamaikan dua kubu yang berlawanan di atas berpendapat bahwa antara *syura* dan demokrasi adalah dua istilah yang mempunyai sisi persamaan. Di antara para cendekiawan yang masuk dalam kelompok

ini adalah Muhammad Husein Haikal, Fahmi Huwaidi, Mohammad Taha, Abdullah Ahmad al-Na'im, Bani Sadr, Mehdi Bazargan, Hasan al-Hakim, Amin Rais.

Terlepas dari perbedaan pendapat para cendekiawan Muslim diatas, konteks demokrasi memang tidak pernah ditemukan di zaman Rasul. Ketika itu Rasul sendiri sebagai seorang Nabi sekaligus seorang pemimpin yang langsung mengajarkan secara tidak langsung nilai-nilai demokrasi tersebut. Maka berkaitan dengan komunikasi Islam, syura adalah bagian dari komunikasi Islam. Maka syura yang dijalankan oleh umat Islam yang juga sebagian ulama disebut demokrasi dapat dikatakan Islami jika menjunjung nilai-nilai keislaman.

Problematika Demokrasi dalam Perspektif Islam

Dalam masyarakat Islam, sebagian ulama dan penguasa politik berpandangan bahwa dalam Islam tak ada tempat bagi paham demokrasi _seperti perbedaan pandangan para tokoh Muslim yang telah dijelaskan sebelumnya_. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat. Sedangkan doktrin Islam sebagai agama mengatakan bahwa hanya Tuhan yang memiliki kekuasaan. Lebih dari itu, sebagian ulama juga mengklaim bahwa Islam adalah agama yang kompleks dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini, maka tak ada aturan hidup kecuali yang telah didekritkan Allah dalam Alquran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu, demokrasi yang memiliki dalil bahwa legitimasi kekuasaan bersumber dari mayoritas rakyat tidak bisa diberlakukan. Justru sejarah menunjukkan bahwa para rasul Tuhan selalu merupakan kekuatan minoritas yang melawan arus suara mayoritas (H.Nihaya M, 2011:19).

Dalam aspek pemikiran demokrasi, Nurcholish Madjid mengemukakan bahwa terjadi dua problem tentang hubungan agama dan demokrasi: *Pertama*, problem filosofis yakni jika klaim agama terhadap pemeluknya sedemikian total maka akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Kedua*, problem historis-sosiologis, ketika kenyataannya peran agama tidak jarang digunakan oleh penguasa untuk mendukung kepentingan politiknya (Madjid, 1994:35).

Menurut Abdurrahman Wahid nilai demokrasi itu ada yang bersifat pokok dan ada pula yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok. Ada tiga hal nilai pokok dalam demokrasi, yaitu kebebasan, keadilan, dan musyawarah. Yang dimaksud

kebebasan di sini adalah kebebasan individu dihadapan kekuasaan negara, atau hak-hak individu warga negara dan hak kolektif dari masyarakat. Kedua *keadilan*, merupakan landasan demokrasi, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang dan berarti juga ekonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi masalah keadilan penting dalam arti seseorang mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi orang itu harus dihormati haknya dan diberi peluang serta kemudahan untuk mencapainya. Maka keadilan terwujud manakala orang tidak mendapat halangan untuk mengekspresikan cita-citanya. Nilai demokrasi yang ketiga *syura* (musyawarah), artinya bentuk atau cara memelihara kebebasan dan memperjuangkan keadilan lewat jalur permusyawaratan (H.Nihaya M, 2011:20).

Menurut Syaikh Fadhallah Nuri, demokrasi adalah persamaan semua warga negara, dan hal ini menurutnya sangatlah tidak mungkin dalam Islam. Dalam demokrasi, perbedaan yang luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi. Misalnya; antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara yang kaya dan miskin, antara *faqih* (ahli hukum) dan penganutnya. Tidak hanya itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Agama Islam menurutnya tidak memiliki kekurangan yang memerlukan penyempurnaan dan dalam Islam tidak ada seorang pun yang diizinkan mengatur hukum. Karena itu, ia menegaskan bahwa demokrasi sangatlah bertentangan dalam Islam (Esposito, 1990:118).

Sedangkan menurut Sayyid Qutb, ia mengatakan bahwa demokrasi adalah sebuah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang kepada yang lainnya. Menurutnya mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan penentangan secara menyeluruh terhadap kekuasaan manusia dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem dan kondisi. Ia menambahkan bahwa agresi menentang kekuasaan Tuhan adalah bentuk jahiliyah. Ia menandakan bahwa negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah, karena Islam sebagai sebuah sistem hukum dan moral sudah lengkap, sehingga dengan demikian tidak ada lagi legislasi lain yang mengatasinya. Pendapat serupa pula dikatakan oleh Mutawali al-Sya'rawi seorang ulama besar asal Mesir yang mengatakan bahwa Islam dan demokrasi tidak bersesuaian, dan *syura* tidak dengan sendirinya demokrasi mayoritas (Kamil, 2002:48).

Ilmuan-ilmuan Barat atau sering disebut orientalis, memiliki pendapat tersendiri dalam memandang sikap umat Islam terhadap demokrasi. Di antaranya adalah Samuel

P. Huntington yang mengatakan bahwa bila orang Islam berusaha memperkenalkan demokrasi ke dalam masyarakat mereka, usaha itu cenderung akan gagal karena Islam, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka, tidak mendukung demokrasi. Lebih lanjut ia berpendapat bahwa kegagalan demokrasi di negara-negara Muslim antara lain disebabkan oleh watak budaya dan masyarakat Islam yang tidak ramah terhadap konsep-konsep liberalisme Barat (Huntington, 1997:112). Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Elie Kedourie. Ia menyatakan bahwa ajaran, norma, kecenderungan, pengalaman keseharian orang Islam telah membentuk pandangan politik kaum Muslimin yang khas dan jauh dari modern. Menurutnya peradaban Islam bersifat unik; kaum Muslim bangga akan warisan masa lalu mereka dan bersikap tertutup terhadap dunia luar. Peradaban seperti ini menurutnya akan menghambat kaum Muslim untuk mempelajari dan menghargai kemajuan politik dan sosial yang dicapai oleh peradaban lain (Lewis, 2002:100).

Problematika demokrasi dikalangan umat Islam ini tidak terlepas dari doktrin-doktrin tradisional dari ajaran Islam yang dipahami terkadang hanya sebatas tekstual. Ini tidak terlepas dari konsep demokrasi yang datangnya dari barat dan sangat asing bagi sistem politik ditengah-tengah umat Islam. Apalagi fakta perkembangan saat ini yang “mengaku” paling demokratis di dunia saat ini adalah Amerika dan sekutunya, tetapi berlaku tidak sesuai dengan konsep-konsep demokrasi yang diajarkan. Dengan berbagai invasi dan serangan militer yang dilakukan negara-negara Barat itu ditengah-tengah negara Muslim dan demokrasi dijadikan alat untuk melanggengkan setiap perbuatan mereka. Dan tindakan politik ini sangat merugikan dunia Islam.

Konsep demokrasi yang menjunjung suara rakyat juga menyalahi aturan-aturan Tuhan. Islam sebagai agama teokrasi menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah, tetapi nyatanya ketimpangan dalam sistem demokrasi terus dipertontonkan lewat lembaga-lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif yang biasa disebut *Trias Politica*. Yang berkuasa makin berkuasa, sedangkan suara rakyat hanya dibutuhkan ketika pemilihan para pimpinan disuatu negeri. Tentunya ini menjadi momok tersendiri bagi umat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dalam tataran komunikasi, demokrasi juga terkadang mengalami ketimpangan secara politik Islam. Jauhnya antara suara rakyat dengan kebijakan publik membuat keguncangan dalam diri rakyat, juga tidak adanya transparansi dalam konsep penyampaian kebenaran menjadi hal yang selalu terjadi dalam sistem demokrasi saat ini.

Pada masyarakat Muslim fundamentalis serta puritan, konsep demokrasi dianggap konsep Iblis ataupun *thagut*. Alquran surah An-Nahl: 36 serta Al-Baqarah: 256 sangat gamblang menjelaskan agar umat Islam menjauhi *thagut*. *Thagut* terkadang ditafsirkan dengan pemimpin ataupun sistem yang tidak berlandaskan Alquran dan hadis, maka demokrasi yang notabene adalah sistem yang dicetuskan oleh orang-orang barat sangat ditolak oleh umat Muslim fundamental. Tentunya alasan-alasan yang dikemukakan tidak selamanya benar dan juga tidak selamanya salah.

Mengenai demokrasi sebagai sistem yang dicetuskan oleh orang-orang barat, maka sangat menarik mengkaji hipotesis Saeful Mujani dalam bukunya yang berjudul *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Ada sebelas poin yang menggambarkan pandangan umat Muslim dalam memandang eksternal umat Islam, yang dikaji dari umat Muslim di Indonesia. Adapun kesebelas poin itu ialah : *Pertama*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya kepada orang lain pada umumnya. *Kedua*, semakin Islami seorang Muslim, ia akan semakin cenderung tidak percaya kepada non-Muslim. *Ketiga*, semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin rendah pula keterikatannya dalam aktivitas kewargaan yang bersifat sekular. *Kelima*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak terlibat dalam politik. *Keenam*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak percaya pada institusi politik. *Ketujuh*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak puas terhadap kinerja demokrasi. *Kedelapan*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung prinsip-prinsip demokrasi. *Kesembilan*, semakin Islami seorang Muslim, ia semakin cenderung tidak mendukung negara-bangsa. *Kesepuluh*, semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin kecil partisipasinya dalam politik, kecuali jika objek dari partisipasinya itu bersifat keislaman. *Kesebelas*, semakin Islami seorang Muslim, cenderung semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi warga yang setia, dan semakin besar kemungkinannya untuk menjadi warga yang teralienasi, naif, dan apatis (Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, 2007:315-323).

Walaupun hipotesis diatas belum bisa menjadi rujukan untuk menetapkan setiap umat Islam yang semakin Islami terpapar hal-hal yang jadi hipotesis diatas, tetapi sedikit banyaknya hipotesis itu bisa menjadi rujukan. Dalam penelitiannya apa yang

menjadi hipotesis Saeful Mujani tidak terbukti dan malah terbantahkan. Maka hal ini menjadikan hasil penelitian itu mengatakan bahwa umat Muslim Indonesia khususnya memiliki sikap moderat terhadap demokrasi.

Kata Islami sendiri menyangkut hal-hal yang baik dalam Islam, tentunya orang-orang yang menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik maka dia sudah bisa disebut Islami. Maka hipotesis itu bisa salah dan juga bisa benar. Tergantung obyektifitas dia dalam melakukan hipotesis. Dalam konteks demokrasi, apa yang menjadi hipotesis Saeful Mujani bisa jadi benar, dikarenakan kebanyakan umat Muslim yang telah memahami ajaran Islam _mungkin secara tekstual_ akan mendapati ketidakcocokan sistem demokrasi dengan ajaran Nabi Muhammad saw.. Dan dalam beberapa hadis juga Nabi melarang umatnya untuk mengikuti apa yang datangnya bukan dari Islam, maka hal ini dipahami salah satunya demokrasi.

Sistem demokrasi yang mendapat kritik oleh umat Islam fundamental adalah sistem yang tentunya tidak dapat menjamin keadilan-keadilan ditengah-tengah masyarakat, justru sistem ini malah mempertahankan *status quo* para pemimpin liberal yang tidak pro pada masyarakat Islam khususnya. Maka demokrasi yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln yang memiliki konsep *government of the people, by the people, and for the people*, tidak menjawab keadilan yang dijunjung tinggi oleh umat Islam.

Moderasi Islam sebagai Solusi Demokrasi

Moderasi Islam dalam bahasa arab disebut dengan *al-Wasathiyah al-Islamiyyah*. Al-Qardawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk kata *Tawazun, I'tidal, Ta'adul* dan *Istiqamah*. Sementara dalam bahasa inggris sebagai *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang Muslim moderat adalah Muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Adapun istilah moderasi menurut Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft* adalah paham yang mengambil jalan tengah, yaitu paham yang tidak ekstem kanan dan tidak pula ekstem kiri (Zuhairi Misrawi, 2010:13)

Menurut K.H. Abdurrahman Wahid bahwa moderasi harus senantiasa mendorong upaya untuk mewujudkan keadilan sosial yang dalam agama dikenal dengan *al-maslahah al-'ammah*. Bagaimanapun hal ini harus dijadikan sebagai fondasi kebijakan publik, karena dengan cara yang demikian itu kita betul-betul menerjemahkan esensi agama dalam ruang publik. Dan setiap pemimpin mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi untuk menerjemahkannya dalam kehidupan nyata yang benar-benar dirasakan oleh publik. Dalam bahasa arab, kata moderasi biasa diistilahkan dengan *wasat* atau *wasatiyah*; orangnya disebut *wasit*. Kata *wasit* sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pereraikan (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa arab, kata tersebut merupakan “segala yang baik sesuai objeknya”. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab disebutkan “*sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah*”. Misalnya *dermawan* yaitu sikap di antara kikir dan boros, *pemberani* yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (RI, 2012:5)

Menurut Yusuf al-Qardawi, umat Islam seharusnya mengambil jalan tengah (Moderasi). Pandangan yang seperti itu membuat umat Islam menjadi mudah dalam menjalankan agamanya. Karena pada hakikatnya, Islam memang agama yang memudahkan umat dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada beberapa prinsip moderasi yang diajarkan oleh Islam yaitu :

Pertama, prinsip keadilan. Dalam pandangan Nurul H. Maarif, (Maarif, 2017:143) Islam mengedepankan keadilan bagi semua pihak. Banyak ayat Alquran yang menunjukkan ajaran luhur ini. Tanpa mengusung keadilan, nilai-nilai agama berasa kering tiada makna, karena keadilan inilah ajaran agama yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Tanpanya, kemakmuran dan kesejahteraan hanya akan menjadi angan. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang diajarkan Islam, banyak ayat dan hadis yang memerintahkan untuk bersikap adil, bahkan sikap adil tidak hanya diperintahkan untuk umat Islam semata. Tetapi untuk semua umat manusia. Maka sikap adil ini menjadi tolak ukur sikap umat Muslim terhadap orang lain.

Kedua, prinsip keseimbangan (*tawazun*). Prinsip moderasi di sini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Islam menyeimbangkan peranan wahyu Ilahi dengan akal manusia dan

memberikan ruang sendiri-sendiri bagi wahyu dan akal. Dalam kehidupan pribadi, Islam mendorong terciptanya keseimbangan antara ruh dengan akal, antara akal dengan hati, antara hak dengan kewajiban, dan lain sebagainya (Setiyadi, 2012:252).

Sedangkan *Ketiga*, toleransi. Quraish Shihab memaparkan dalam jurnalnya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* (Shihab, 2000:551) bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan. Keniscayaan perbedaan dan keharusan persatuan itulah yang mengantarkan manusia harus bertoleransi. Kedamaian, kemaslahatan dan kemajuan tidak dapat dapat dicapai bila tanpa adanya toleransi.

Konsep keadilan dan keseimbangan sangat banyak dijelaskan secara dalil baik Alquran maupun hadis. Pada tataran ajaran pokok kenabian ketika Nabi Muhammad berada di Mekkah, selain mengajarkan nilai-nilai ketauhidan, beliau juga menolak segala bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kaum fakir ataupun budak. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi adalah agama keadilan, oleh karena itu agama Islam banyak diikuti kaum tertindas kala itu. Maka dalam moderasi Islam, sanga menjunjung tinggi sikap-sikap adil tersebut. Dalam tataran keseimbangan (*tawazun*), Islam mengajarkan bahwa penganut agama ini diharapkan mampu bersikap seimbang baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Tidak boleh melebihkan salah satunya hingga melupakan salah satunya. Jika hanya memikirkan akhirat tanpa melakukan hal-hal duniawi (seperti bekerja, menuntut ilmu, bersosialisasi dsb) maka dalam segi kehidupan akan timpang dan bisa menyebabkan jauhnya ajaran Islam dari kehidupan sosial. Sedangkan jika hanya memikirkan duniawi, maka orang tersebut akan jauh dari sikap-sikap moral baik kepada Allah Swt. ataupun kepada sesama manusia. Keseimbangan juga dapat dipahami sikap yang bisa menyatukan dan menjadi penengah dalam setiap problem yang ada di masyarakat.

Beberapa gambaran keseimbangan inilah yang biasa dikenal dengan istilah “moderasi”. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa inggris, *moderation*, yang artinya adalah sikap sedang atau sikap tidak berlebihan. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat berarti ia wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim.

Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik

agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri. Tak pelak lagi, ragam pemahaman keagamaan adalah sebuah fakta sejarah dalam Islam. Keragaman tersebut, salah satunya, disebabkan oleh dialektika antara teks dan realitas itu sendiri, dan cara pandang terhadap posisi akal dan wahyu dalam menyelesaikan satu masalah. Konsekuensi logis dari kenyataan tersebut adalah munculnya terma-terma yang mengikut di belakang kata Islam. Sebut misalnya, Islam Fundamental, Islam Liberal, Islam Progresif, Islam Moderat, dan masih banyak label yang lain (Darlis, 2017:231)

Islam pada dasarnya adalah agama universal, tidak terkotak-kotak oleh label tertentu, hanya saja, cara pemahaman terhadap agama Islam itu kemudian menghasilkan terma seperti di atas. Diterima atau tidak, itulah fakta yang ada dewasa ini yang mempunyai akar sejarah yang kuat dalam khazanah Islam. Fakta sejarah menyatakan bahwa embrio keberagaman tersebut sudah ada sejak era Rasulullah, yang kemudian semakin berkembang pada era sahabat, terlebih khusus pada era Umar bin Khattab. Ia kerap kali berbeda pandangan dengan sahabat-sahabat yang lain, bahkan mengeluarkan ijtihad yang secara sepintas bertentangan dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw sendiri.

Pada konteks demokrasi sebagai sistem politik saat ini, umat Islam mengambil peran yang besar dalam menciptakan moderasi yang ada. Orang Islam_khususnya di Indonesia_ terkenal dengan sikap-sikap moderat, dan toleransi yang tinggi, terbukti sebagai negara mayoritas umat Islam sangat sedikit konflik horizontal yang terjadi yang sampai merusak tatanan bernegara. Moderasi Islam sudah diperkenalkan oleh Rasulullah ketika memimpin di Madinah, dengan tonggak utama yang dilakukan Nabi ialah Piagam Madinah. Piagam ini menjadi ukuran sikap-sikap demokrasi yang tinggi yang menembus batas pengetahuan orang-orang Arab kala itu. Dengan adanya Piagam Madinah, Rasul mampu menciptakan konsep keadilan bagi setiap golongan, tidak memandang suku, ras, ataupun agama. Walaupun Nabi datang dengan sikap dakwah Islam, tapi Rasulullah tak pernah memaksakan orang diluar Islam memasuki Islam.

Konsep demokrasi yang telah tercermin dari kebijakan-kebijakan Rasul sebagai pemimpin masyarakat kala itu harusnya mampu menjadi *rule model* bagi umat Islam saat ini. Yang menjadi pertentangan bagi umat Islam dalam hal demokrasi adalah konteks tatanan yang tidak pro keadilan. Konsep demokrasi haruslah menjadi konsep yang utuh dalam memperjuangkan sikap-sikap yang adil. Sebagai agama, konsep moderasi tertanam dalam diri umat Islam. Moderasi Islam menuntun umatnya agar

bersikap toleransi dan bersikap transparan dan tidak memihak. Islam hanya memihak pada kebenaran, bukan kepentingan individu ataupun kelompok. Dalam hal hukum pun Islam tidak boleh mengutamakan segelintir kelompok.

Demokrasi sejatinya adalah konsep yang diusung oleh barat, hal ini muncul dikarenakan sudah lemahnya sistem khilafah atau runtuhnya kekhilafahan Utsmani pada tahun 1924, tentunya barat mendominasi baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dalam bidang politik, barat membuat sistem demokrasi bagi negara-negara Republik yang dibawah PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Tidak terkecuali oleh negara-negara Islam. Maka demokrasi dikombinasikan dengan ajaran Islam dalam sikap moderasi Islam.

Moderasi Islam seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengertian bahasa ialah *wasathiyah al-islamiyah*. Pada konsep ini menarik mengkaji pendapat dari Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa karakter *wasathiyah* akan mengantar dan mengarahkan manusia kepada karakter dan perilaku adil dan proporsional dalam setiap hal. Selain itu ia pun mendefinisikan konsepsi *wasathiyah* berdasarkan beberapa paradigma yang berbeda, tetapi kesemuanya saling menyempurnakan secara substansial. Diantara hal yang sangat penting adalah:

Pertama, posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan, hal mana mengantar manusia berlaku adil. Posisi pertengahan menjadikan seseorang dapat dilihat siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika itu ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Posisi itu juga menjadikannya dapat menyaksikan siapa pun dan di mana pun. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul saw. *Syahid*, yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan dan beliau pun disaksikan, yakni dijadikan teladan dalam segala tingkah laku. Itu lebih kurang yang dimaksud oleh lanjutan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan umatnya.

Kedua, ada juga yang memahami *ummatan Wasathan* dalam arti pertengahan dalam pandangan tentang Tuhan dan dunia. Tidak mengingkari wujud Tuhan tetapi tidak juga menganut paham politeisme (banyak Tuhan). Pandangan Islam adalah Tuhan Maha Wujud dan Dia Yang Maha Esa. Pertengahan juga adalah pandangan umat Islam tentang kehidupan dunia ini. Tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi

tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah segalanya. Pandangan Islam tentang hidup adalah disamping ada dunia ada juga akhirat, keberhasilan di akhirat ditentukan oleh iman dan amal shaleh di dunia. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ketika pandangan mengarah ke langit kaki harus tetap berpijak di bumi. Islam mengajar umatnya agar meraih materi duniawi tetapi dengan nilai-nilai samawi (Shihab, 2000:325).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Quraish Shihab diatas maka konsep moderasi menjadi solusi utama dalam menerima demokrasi. Karena jika tidak dapat menafsirkan demokrasi dengan benar dan memaksakan kehendak dalam kesempatan beragama maka yang muncul adalah sikap-sikap ekstremisme yang tidak dilandasi oleh Alquran dan hadis. Banyak ayat Alquran maupun hadis Rasul harus dipahami secara kontekstual. Maka dalam memahami sistem yang ada di zaman sekarang ini maka diperlukannya elaborasi bagi sistem demokrasi terhadap apa yang diajarkan Islam, agar terciptanya Islam yang *rahmatan lil alamin*.

Islam Rahmatan Lil Alamin Sendi Utama Moderasi Islam

Ajaran Islam *Rahmatan lil Alamin* bukan hal baru dalam konsep pemikiran Islam dan memiliki basis yang kuat dalam teologi Islam. Kata “Islam” berasal dari kata *aslama* yang berakar kata *salama*. Kata Islam adalah bentuk infinitif dari kata *aslama* ini (Rasyid, 2016:102) Menurut Ibnu Mandzur, makna “rahmat” adalah *al-Riqqatu wa al-Ta’attufi* (kelembutan yang berpadu dengan rasa keibaan) (Ibnu Mandzur, 1999:173). Al-Asfahani mempertegas bahwa dalam konsep rahmat adalah belas kasih semata-mata (*al-Riqqat al-Mujarradah*) dan kebaikan tanpa belas kasih (*al-Ihsan al-Mujarrad duna al-Riqqat*) (Abi al-Qasim al-Husain Ibn Muhammad (al-Asfahani), 2009:253-254). Ibnu Faris mengartikan kata ini dengan merujuk kepada makna kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Dan dari akar kata ini, lahir kata *rahima* yang memiliki arti ikatan darah, persaudaraan dan hubungan kerabat (Abi Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, 1979:498).

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* tentunya memiliki konsep universal dan manusiawi (Boisard, 1980:183-192). Menurut Yusuf Al-Qardhawi mengenai universalisme Islam bahwa ada beberapa teori yang melandasinya, yaitu: *pertama*, Islam adalah agama rasional yang diturunkan untuk seluruh manusia yang berakal. *Kedua*,

Islam menghormati masalah-masalah dunia, karena ditujukan untuk kemakmuran bumi. *Ketiga*, kemanusiaan membutuhkan keseimbangan yang hanya dapat diperoleh dari Islam, karena mengajarkan hubungan saling melengkapi antara agama dan dunia, ruh dan materi, serta keduniaan dan keakhiratan. *Keempat*, Islam berlaku universal, karena menyeru kepada seluruh manusia (Yusuf Qardhawi, 1994:73-83).

Pada poin kedua dan ketiga konsep yang ditekankan adalah Islam menghormati hal-hal duniawi dan juga menuntut adanya keseimbangan. Moderasi yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki pengertian keseimbangan. Dalam konteks ini tidak ada solusi yang sangat baik kecuali menjalankan Islam dengan konsep *rahmatan lil alamin*. Dalam Alquran, Terdapat pada al-quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi: “*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*” sangat jelas Allah menurunkan Nabi terakhirNya di dunia untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Moderasi Islam sangat membutuhkan legitimasi dari sosok Nabi yang paripurna. Maka, sebagai umatnya sudah sepatutnya menjadikan sosok Nabi sebagai tauladan utama untuk menjalankan setiap pergerakan demokrasi di dunia ini.

Berbicara mengenai Islam Universal atau *rahmatan lil alamin*, Anshari menegaskan bahwa kebenaran Islam adalah mutlak, universal dan eternal, serta tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia mengelompokkannya secara sederhana, *pertama*, Islam mengatur berbagai hubungan manusia, baik dengan Tuhannya, dengan sesamanya atau lingkungannya untuk kesejahteraan seluruh manusia dan alam sekelilingnya. *Kedua*, Islam merupakan sistem yang mencakup *aqidah*, *syari'ah*, dan *akhlaq* yang saling berkaitan erat. *Ketiga*, Islam adalah ajaran yang heterogen dilihat dari ajaran *fiqh*-nya, sehingga Islam mengamini kebudayaan yang berbeda-beda dan meliputi semuanya (universal) (Rifyal Ka'bah, 1996:38-40).

Anshari menekankan bahwa Islam yang menggambarkan *rahmatan lil alamin* adalah Islam memiliki hubungan baik dengan Tuhannya dan manusia keseluruhan, dan juga menekankan umat Islam dalam menjalin hubungan terhadap sesama manusia haruslah mengedepankan konsep kesejahteraan bagi sekelilingnya. Maka konsep ini sangat lah diharapkan mampu menjadi solusi moderasi Islam. Islam yang moderat adalah Islam yang menuntun umatnya agar selalu berbuat baik bagi sekelilingnya dan mampu memberikan manfaat bagi sekelilingnya. Dalam tataran demokrasi, seharusnya demokrasi menjadi alat untuk bisa bermanfaat dan berbuat baik bagi seluruh manusia. Maka demokrasi itu hanyalah konsep, layaknya pisau, apabila digunakan oleh penjahat

maka digunakan untuk hal-hal jahat, sedangkan jika digunakan ditangan juru masak, maka akan digunakan untuk memasak dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Begitupun demokrasi, bisa digunakan menjadi alat demi kebaikan umat dan bangsa.

Aspek keislaman tidak terlepas dari nilai-nilai ketauhidan, walaupun konsep rahmatan lil alamin selalu berbicara mengenai konsep sosial, tetapi tetap yang dituju ialah meraih ridha Allah Swt. Tetapi kadang sikap-sikap teologis atau ketauhidan membawa orang jauh dari dunia sosial, kalau tidak dikatakan *anti-sosial*. Padahal Islam sangat menjunjung sikap-sikap sosial yang baik. Menurut Machasin bahwa di satu sisi, semangat ketauhidan yang kehilangan panggunnya membuat problem teologis orang-orang Islam saat ini. Penyegaran ini diperlukan sebagai bentuk upaya implementasi ajaran Islam secara baik dan benar kontekstual, namun tidak kehilangan dasarnya dan setiap orang mampu membawa Islam dengan semangat kemanusiaan. Semangat ketauhidan yang berlebihan berpotensi meninggalkan esensi alam raya dan kehidupan, seperti kemiskinan, kebodohan, keserakahan dan lainnya. Perdamaian hakiki tidak akan wujud sebelum penggunaan nalar dalam memahami agama berada pada posisi yang baik. Islam sebagai *rahmatan lil Alamin* dengan sikap ini menghantarkan orang menuju “jalan Tuhan” (Machasin, 2001:56).

Kondisi umat Muslim saat ini (secara keseluruhan) belum mampu— untuk tidak mengatakan tidak mampu—membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan itu menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya, apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa ketinggian “ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat Muslim” sendiri (*Al-Islâm mahjûbun bil-Muslimîn*). Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran kaum Muslimin bukanlah disebabkan ajaran agamanya, tetapi kesalahan terletak pada diri masing-masing pribadinya. Mereka keliru dalam memahami ajaran agama lantaran kejumudannya. Kadangkala apa yang diamalkan bertolak belakang dengan sumber aslinya. Pemahaman yang keliru akan melahirkan tindakan yang keliru pula. Ironisnya, jika mempertahankan pemikirannya dengan cara apa pun (Imam Munawwir, 1983:115).

Kesalahan-kesalahan umat Islam dalam memahami Islam yang *kaffah* menjadi penghalang tersendiri terbentuknya moderasi Islam. Moderasi Islam dikalangan masyarakat Islam yang puritan serta fundamental sangat sulit diterima. Apalagi moderasi Islam dianggap melonggarkan sistem-sistem barat. Hal ini tentunya menjadi kajian yang panjang jika dibahas pada tulisan ini. Islam datang dengan konsep yang

paripurna, dibawa oleh Nabi yang paripurna pula. Maka Alquran haruslah bisa menjawab segala tantangan zaman. Moderasi Islam sebenarnya telah ada di dalam setiap diri umat Islam, dalam bentuk-bentuk sikap yang toleran dan *open minded*. Apalagi dengan didukung oleh dalil Alquran dan hadis, maka sikap-sikap moderasi ini mendapat legitimasi yang sakral.

Menurut Abudin Nata Islam sebagai *rahmatan lil alamin* sering diganggu dalam pengimplementasiannya. Ada beberapa hal yang mengganggu tegaknya Islam *rahmatan lil alamin*, yaitu: *pertama*, diganggu oleh subjektifitas kepentingan pribadi. *Kedua*, pelaksanaan Islam *rahmatan lil alamin* sering diganggu oleh mereka yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi; mereka ingin memaksakan Islam sebagai dasar negara, dan memberlakukan hukum Islam secara formal dan kaku. *Ketiga*, Islam *rahmatan lil alamin* sering diganggu oleh gambaran negatif atau stigma yang diberikan pihak lawan untuk memberi citra ajaran Islam sebagai ajaran yang keras, kejam dan diskriminatif. Stigma ini misalnya diberikan kalangan Barat dengan memberikan tafsir secara hitam putih terhadap ajaran Islam, terutama ayat-ayat Alquran tentang jihad. *Keempat*, Islam *rahmatan lil alamin* juga terkadang diganggu oleh mereka yang memahami dan mengamalkan ajaran Islam lebih mengutamakan syari'at daripada hakikat atau tujuannya (Abuddin Nata, 2016).

Rahmatan lil alamin sebagai sebuah konsep telah menjadi suatu yang paling sempurna. Tanpa konsep ini tentunya Islam hanya menjadi sebuah agama ritual yang kering akan makna dan esensi kemanusiaannya. Tentunya tidak akan ada konsep moderasi Islam jika konsep *rahmatan lil alamin* ini tidak diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabinya. Maka satu-satunya jalan menempuh moderasi Islam dalam menuju demokrasi yang baik serta berketuhanan adalah dengan menjalani konsep Islam *rahmatan lil alamin*.

Walaupun banyak halangan dan rintangan baik secara internal ataupun eksternal dari umat Islam untuk terwujudnya sebuah agama Islam yang *rahmatan lil alamin*, tetap saja konsep ini murni datangnya dari Tuhan semesta alam dan diturunkan melalui NabiNya yang paling sempurna akhlakNya, maka tidak akan bisa terhapus konsep ini sampai dunia berakhir. Tetapi, tetap sebagai umat Islam yang mencintai Allah dan RasulNya harus selalu menjaga syariat yang telah ditetapkanNya, agar terbentuknya kedamaian di dunia dan selamat di akhirat.

Simpulan

Pada tulisan ini penulis menekankan bahwa komunikasi Islam, Demokrasi serta Moderasi Islam menjadi suatu yang saling berkaitan. Demokrasi hanya akan tercipta jika terjalin komunikasi yang baik. Dan di dalam Islam telah diatur komunikasi-komunikasi yang menuntun umatnya kearah yang baik. Komunikasi Islam akan terlaksana dengan baik apabila sang komunikator menjadikan Islam sebagai landasannya berkomunikasi. Komunika Islam dalam tataran demokrasi memiliki arti yang luas. Karena demokrasi sendiri bisa dipahami secara luas. Maka komunikasi Islam dalam tataran demokrasi berarti seorang Muslim harusnya mampu menjadi pelopor dalam menyuarakan kebenaran.

Banyak perbedaan pendapat antara cendikiawan Muslim ataupun ulama mengenai demokrasi, apakah demokrasi memang termasuk dalam ajaran Islam atau tidak. Beberapa ulama menolak sama sekali demokrasi dikarenakan demokrasi adalah produk barat dan dengan kenyataan yang ada saat ini demokrasi sama sekali tidak menjadi solusi bagi masyarakat Islam. Malah demokrasi dianggap telah menjadi alat politik bagi barat dalam melegitimasi gerakan-gerakannya untuk menghancurkan Islam. Sebagian ulama menerima dengan utuh konsep demokrasi dan menganggap orang-orang yang menolaknya sebagai radikal, fundamental hingga ekstremis, lalu ada juga beberapa ulama yang berusaha menjadi penengah, dengan menerima konsep demokrasi dengan syarat apabila demokrasi tersebut bisa menjadi solusi bagi kesejahteraan umat dan bangsa.

Dalam konsep demokrasi tentunya umat Islam lebih banyak menerima daripada menolak, walaupun konsep ini datang dari barat, tetapi konsep ini jika dikaji dengan Alquran dan hadis tidak menemui pertentangan. Tetapi tetap saja sistem buatan manusia tidaklah sempurna, pastilah ada kepentingan-kepentingan yang akan terjadi di dalamnya.

Pada tataran moderasi Islam, demokrasi diterima sangat lapang, dikarenakan orang-orang Islam yang menjunjung tinggi Islam yang moderat akan menganggap demokrasi sebagai alat untuk menjalankan sistem-sistem kehidupan di dunia Islam, baik dari segi sosial, budaya, politik dan ekonomi. Sejauh yang dipahami, Islam tidak pernah secara langsung mengajarkan demokrasi. Tetapi sikap dan kebijaksanaan Rasulullah Saw telah menggambarkan nilai-nilai demokrasi tersebut, apalagi dengan

sikapnya yang paripurna mampu menyatukan jazirah Arab kala itu, yang selama berabad-abad hidup dalam konsep sektarian dan kejumudan pemikiran.

Maka konsep demokrasi dalam tataran moderasi Islam hanya bisa terwujud jika Islam *rahmatan lil alamin* mampu dijalankan. Karena satu-satunya konsep yang paling sempurna di dunia ini adalah konsep yang diajarkan oleh Alquran dan hadis, dan hal ini hanya dimiliki oleh umat Islam. Konsep *rahmatan lil alamin* tidak akan mampu terlaksanakan jika masih ada orang-orang Islam yang berpikiran sempit dan intoleran, padahal Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Oleh karena itu, konsep komunikasi Islam, demokrasi serta moderasi Islam saling berkaitan jika menjunjung tinggi nilai-nilai Islam *rahmatan lil alamin*.

Daftar Pustaka

- Al-Syawi, Taufiq. 1997. *Syura Bukan Demokrasi*, terj. Djamaluddin ZS, Jakarta: Gema Insani Press.
- Bellah, Robert N. 1991. "Islamic Tradition and the Problem of Modernization," dalam kumpulan tulisannya *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditionalist World*. Berkeley: University of California Press.
- Boisard, Marcel A. 1980. *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Darlis. 2017. *Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural*. Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 13 No.2.
- Departemen Agama RI. 2012. *Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran.
- Engineer, Ashgar Ali. 2009. *Islam dan Teologi Pembebasan*. Cet. ke. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Esposito, Piscatori. 1991, "Islam and Democracy". *Middle East Journal* VI, no. III.
- Fiske, John, 1990. *Introduction to Communication Studies*, London dan New York: Routledge.
- Haikal, Muhammad Husein. 1993. *Pemerintahan Islam*. terj. Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Huntington, Samuel P. 1997. *The Clash of Civilizations: Remaking of The World Order*. New York: Simon and Schuster.
- Huwaiti, Fahmi. 1993. *Al-Islam wa al-Demuqratiyah*. Kairo: Markaz al-Ahram.
- Huwaiti, Fami. 1996, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, terj. M. Abdul Ghofar. Bandung: Mizan.
- Irawan, Benny Bambang. 2007. "Perkembangan Demokrasi di Indonesia". *Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol. 5 No.1.

- Ka'bah, Rifyal, et.al. 1996. *Percakapan Cendekiawan tentang Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Kamil, Sukron. 2002. *Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kedourie, Elie. 1994. *Democracy and Arab Political Culture*. Portland: Frank Cass.
- Lewis, Bernard. 2002. *What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern Response*. Oxford: Oxford University Press.
- M, H.Nihaya. 2011. *Demokrasi dan Problematikanya Di Indonesia, Makassar*. Jurnal Sulesana, Volume 6 Nomor 2.
- Maarif, Nurul H. 2017. *Islam Mengasihi Bukan Membenci*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Machasin. 2001. *Islam Dinamis, Islam Historis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, Yogyakarta: LkiS.
- Madjid, Nurcholis. 1994. *Demokratisasi Politik Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: Paramadina.
- Mandzur, Ibnu. 1999. *Lisanul Arab*, Vol. 5. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.
- Maududi, Abu A'la. 1998. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, Jakarta. Bandung: Mizan.
- Misrawi, Zuhairi. 2010. *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Muhammad, Abi al-Qasim al-Husain Ibn (al-Asfahani). 2009. *al-Mufradatu fi Gharibi Alqurani*, Vol. 2. Mekkah: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.
- Mujani, Saiful, 2007. *Muslim Demokrat: Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Munawwir, Imam. 1983. *Salah Paham Terhadap Alquran*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Nata, Abuddin. 2016. *Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*, Malang : Makalah disampaikan pada acara Kuliah

Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim.

Rasyid, Muhammad Makmun. 2016. *Islam Rahmatan Lil Alamin Perspektif Kh. Hasyim Muzadi*. Jurnal Episteme, Vol. 11, No. 1.

Qardhawi, Yusuf. 1994. *Agenda Permasalahan Umat*. Jakarta: Gema Insani Press.

Setiyadi, Alif Cahya. 2012. *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisasi*. Jurnal Vol. 7, No. 2.

Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir Al-Mishbah*. Ciputat: Lentera Hati.

Sihbudi, Riza. 1993. "Masalah Demokratisasi di Timur Tengah," dalam *Agama, Demokrasi, dan keadilan*, terj.M. Imam Aziz. Jakarta: Gramedia.

Taher, Elza Peldi. 1994. *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi; Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru*. Jakarta: Paramadina.

Tamara, M. Nasir dan Elza Peldi Taher. 1996. *Agama dan Dialog Antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina.

Thalhah, Mustafa Muhammad. 2002. *Rekontruksi Pemikiran Menuju Gerakan Islam Modern*. Surakarta: Intermedia.

Zakariya, Abi Husain Ahmad Ibn Faris Ibn. 1979. *Mu'jam Maqayisu al-Lughati*, ditahqiq Abd Salam Muhammad Harun, Vol. 2. Beirut: Dar al-Fikr.